

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ketika dunia di terpa krisis ekonomi, otomatis kondisi ekonomi di Indonesia pun ikut memburuk. Krisis yang menimpa perekonomian di Indonesia ini terjadi pada 1997 hingga 1998, dimana diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang menyebabkan resesi ekonomi. Dari krisis tersebut, kita semua tahu bahwa hanya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat bertahan.

Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap berkembangnya UMKM. Tidak saja jumlah UMKM di Indonesia yang mendominasi, tetapi UMKM juga terbukti mampu memberikan kontribusi serta memiliki peran nyata pada sektor perekonomian kita, dengan karakteristiknya yang dinamis, efisien dan kuat mampu membangun ekonomi negara. Pasca krisis tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa jumlah UMKM terus meningkat. Selama 16 tahun (periode 1997-2013), UMKM bahkan mampu menyerap 114.144.082 tenaga kerja, dengan 57.895.721 unit UMKM. Dengan kata lain, sesuai data dari kementerian KUKM Indonesia pada Tuti & Dwijayanti (2014) menyatakan UMKM mampu memberikan kontribusi dengan menyerap 97% tenaga kerja, sebesar 56% dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, nilai ekspor nasional dan investasi nasional yang ada di Indonesia pada Tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah pelaku UMKM meningkat sebesar 3,1 persen, dan meningkat sangat pesat di tahun-tahun berikutnya.

Perhatian pemerintah kepada UMKM yang begitu besar menjadi salah satu langkah strategis yang tepat dibutuhkan bangsa Indonesia. Meskipun keseriusan akan kepedulian pemerintah terhadap UMKM dengan program-programnya untuk menumbuh kembangkan UMKM dan menjadikannya berhasil bukan berarti tanpa kendala. Pembangunan ekonomi nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab kita bersama.

Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah punya andil besar dalam hal untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan fasilitas penunjang tersebut.

Besarnya potensi UMKM saat ini nyatanya belum sebanding dengan tingkat kemajuan UMKM. UMKM masih dihadapi dengan berbagai masalah yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha tersebut dalam kegiatan teknisnya. Satu dari berbagai masalah yang masih sering dihadapi oleh UMKM adalah kesulitan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan pada kegiatan operasi usahanya. Pelaku UMKM mendapatkan pemahaman dalam menyusun laporan keuangan sejak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan SAK EMKM, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang menjadi salah satu syarat kredit bank dalam industri keuangan. Laporan keuangan menjadi salah satu komponen yang harus dimiliki oleh UMKM jika ingin usaha mereka berkembang dengan mengajukan modal kepada para kreditur yang dalam hal ini adalah pihak perbankan.

UMKM di Kota Pontianak sendiri telah banyak yang berkembang dan tersebar di setiap kecamatannya dan mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020, dimana pada tahun 2019 sebanyak 28.706 unit dan mengalami lonjakan pada tahun berikutnya sebesar 30.506 unit. Berikut ini merupakan data UMKM yang ada di Kota Pontianak pada tahun 2020:

**Tabel 1. 1 Data UMKM di Kota Pontianak**

No.	Kecamatan	Tahun	Jumlah
1.	Pontianak Barat	2016	1.096
2.	Pontianak Selatan	2016	1.581
3.	Pontianak Utara	2016	562
4.	Pontianak Timur	2016	1.068
5.	Pontianak Kota	2016	2.717
6.	Pontianak Tenggara	2016	788
7.	Pontianak Barat	2017	1.129
8.	Pontianak Selatan	2017	1.614
9.	Pontianak Utara	2017	605
10.	Pontianak Timur	2017	1.102
11.	Pontianak Kota	2017	2.752

12.	Pontianak Tenggara	2017	809
13.	Pontianak Barat	2018	1.255
14.	Pontianak Selatan	2018	2.838
15.	Pontianak Utara	2018	1.713
16.	Pontianak Timur	2018	907
17.	Pontianak Kota	2018	1.203
18.	Pontianak Tenggara	2018	668
19.	Pontianak Barat	2019	5.138
20.	Pontianak Selatan	2019	7.205
21.	Pontianak Utara	2019	3.366
22.	Pontianak Timur	2019	2.804
23.	Pontianak Kota	2019	8.361
24.	Pontianak Tenggara	2019	1.832
25.	Pontianak Barat	2020	6.052
26.	Pontianak Selatan	2020	7.541
27.	Pontianak Utara	2020	3.631
28.	Pontianak Timur	2020	2.343
29.	Pontianak Kota	2020	8.782
30.	Pontianak Tenggara	2020	2.157

*Sumber: data.pontianakkota.go.id*

Tabel 1.1 menunjukkan, betapa pesatnya perkembangan UMKM di Kota Pontianak. Bahkan pada saat pandemi tahun 2020, dari semua kecamatan yang ada di Kota Pontianak, kecamatan Pontianak Kota memiliki sebanyak 8.782 unit, dengan begitu menjadikannya kecamatan yang memiliki pelaku UMKM paling tinggi di Kota Pontianak pada tahun 2020. Melihat tingginya pelaku UMKM yang tersebar di penjuru Kota Pontianak maka sudah seharusnya memahami dan melaksanakan pemberlakuan SAK EMKM untuk menunjang usaha yang dimiliki.

Madanmohan Rao dalam Oktavianti (2015), terdapat lima tingkat kesiapan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada penelitian ini sebagai berikut:

- a) *Not Ready*, dengan karakteristik belum adanya pemahaman mengenai laporan keuangan berbasis SAK EMKM.
- b) *Preliminary*, dengan karakteristik sudah mengenal pentingnya laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

- c) *Ready*, dengan karakteristik individu dalam organisasi sudah mempraktikkan aktivitas yang efektif untuk mendukung laporan keuangan berbasis SAK EMKM.
- d) *Receptive*, dengan karakteristik laporan keuangan berbasis SAK EMKM sudah berjalan efektif dan efisien.
- e) *Optimal*, organisasi sudah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibel terhadap persyaratan yang ditentukan dalam SAK EMKM.

Menurut Salmiah, et al (2018), pemahaman pelaku UMKM didapat melalui bentuk pernyataan yang telah disesuaikan meliputi pengukuran, asumsi dasar dan penyajian laporan keuangan. Pada penelitiannya pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM berada pada tingkat cukup.

Untuk memaksimalkan implementasi SAK EMKM, maka para pelaku UMKM perlu terlebih dahulu memahami dan siap atas penerbitan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hal yang telah diurai dari latar belakang diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut lagi, sampai dimana tingkat pemahaman dan sejauh mana kesiapan para pelaku UMKM, yang menjadi dasar penelitian bagi penulis untuk memberi judul penelitian ini dengan “**Analisis Tingkat Pemahaman UMKM dalam Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, didapat rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM tentang laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM?
4. Apa saja kendala yang dihadapi pelaku UMKM terhadap pertumbuhan usahanya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, didapat tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM tentang laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM.
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pelaku UMKM terhadap pertumbuhan usahanya.

### **1.4 Kontribusi Penelitian**

#### **1.4.1 Kontribusi Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan dapat dijadikan acuan dalam menyusun penelitian berikutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit informasi dan menjadi sumber referensi bagi mahasiswa juga peneliti-peneliti berikutnya.

#### **1.4.2 Kontribusi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut:

- a. Bagi pelaku UMKM  
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi acuan bagi pelaku UMKM agar menggunakan laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM, dengan harapan dapat meningkatkan prospek usaha sehingga terjaminnya keberlangsungan usaha.
- b. Bagi DSAK IAI

Penelitian ini diharapkan membantu DSAK IAI mengetahui apakah pelaku UMKM tersebut siap dan paham dalam menerapkan laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM.